



Legitimasi Transnasional Tahta Suci: Analisis Komunikasi Moral di Era Multipolar

Obi Pratama¹

¹Universitas Wanita Internasional, Indonesia

Email: obipratama@iwu.ac.id, obipratama09@gmail.com

Abstract

The global governance crisis in the fragmented multipolar era has paralyzed secular multilateral institutions, amplifying the need for transnational moral authority. This study analyzes the influence of the Papal moral communication on shaping the Holy See's global legitimacy as a transnational governance actor. Grounded in global governance, public diplomacy, and constructivist communicative action theories, this research employs a mixed-method sequential explanatory design. Quantitative data were gathered through an exploratory perception survey of 40 expert respondents selected via purposive sampling, subsequently analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that the Papal moral communication variables exert a positive and significant effect on global legitimacy, yielding a coefficient of determination (R^2) of 0.785. All hypotheses were accepted; communicator credibility, message universality, and responsiveness to macro-issues simultaneously determine global trust and normative authority. Qualitative discussion confirms the Holy See's role as a norm entrepreneur capable of converting soft power into voluntary compliance across geopolitical blocs. This study enriches governance literature on value-based governance, demonstrating that contemporary transnational legitimacy can be reproduced through universal strategic communication management, transcending the traditional material capabilities of nation-states.

Keywords: *Global Governance, Moral Communication, Holy See, Public Diplomacy, Legitimacy.*

Abstrak

Krisis tata kelola global di era multipolar memicu kelumpuhan institusi multilateral sekuler, sehingga meningkatkan kebutuhan akan otoritas moral transnasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komunikasi moral Kepausan terhadap pembentukan legitimasi global Tahta Suci sebagai aktor tata kelola transnasional. Berlandaskan teori global governance, public diplomacy, dan tindakan komunikatif konstruktivis, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method desain sekuensial eksplanatori. Data kuantitatif diperoleh melalui exploratory perception survey terhadap 40 responden ahli menggunakan teknik purposive

sampling, yang kemudian diuji dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi moral Kepausan berpengaruh positif dan signifikan terhadap legitimasi global dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,785. Seluruh hipotesis diterima; kredibilitas komunikator, universalitas pesan sekuler-kemanusiaan, dan responsivitas terhadap isu makro secara simultan menentukan global trust dan otoritas normatif. Diskusi kualitatif mengonfirmasi peran Tahta Suci sebagai norm entrepreneur yang mengonversi soft power menjadi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) lintas blok geopolitik. Implikasi studi ini memperkaya literatur ilmu pemerintahan mengenai value-based governance, membuktikan bahwa legitimasi transnasional kontemporer dapat direproduksi melalui manajemen komunikasi strategis universal melampaui dominasi kekuatan material negara.

Keywords: Tata Kelola Global, Komunikasi Moral, Tahta Suci, Diplomasi Publik, Legitimasi.

1. PENDAHULUAN

Tatanan politik global saat ini tengah mengalami pergeseran struktural yang sangat masif, bergerak dari hegemoni unipolar menuju sistem multipolar yang sangat terfragmentasi. Dalam transisi ini, dunia tidak hanya dihadapkan pada persaingan kekuatan ekonomi dan militer antarnegara besar, tetapi juga pada krisis tata kelola global (*global governance crisis*). Institusi-institusi multilateral sekuler yang selama ini menjadi tulang punggung sistem internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerap kali menemui jalan buntu akibat polarisasi kepentingan nasional dan hak veto negara-negara adidaya. Kegagalan institusi formal berbasis negara (*state-centric*) dalam merespons isu-isu mendesak seperti konflik geopolitik, krisis pengungsi, dan perubahan iklim memunculkan kekosongan otoritas dan krisis legitimasi di tingkat global. Dalam konteks ilmu pemerintahan transnasional, tatanan multipolar yang retak ini membutuhkan sebuah mekanisme tata kelola alternatif yang tidak semata-mata mengandalkan kekuatan pemaksa (*hard power*), melainkan bertumpu pada pembangunan konsensus normatif (Salzburg Global Seminar, 2026; Dingwerth & Pattberg, 2006).

Di tengah melemahnya kepercayaan terhadap institusi sekuler, dinamika tata kelola global kekinian menunjukkan kebangkitan kembali peran aktor transnasional berbasis moral. Kepemimpinan moral menjadi elemen yang sangat krusial ketika kepemimpinan politik dan ekonomi global gagal menghadirkan solusi atas ketimpangan sosial dan konflik bersenjata. Dalam ruang kekosongan inilah, Tahta Suci (Vatikan) memosisikan dirinya bukan sekadar sebagai entitas agama, melainkan sebagai aktor tata kelola transnasional yang krusial. Kehadiran Tahta Suci dalam arena internasional menawarkan sebuah jangkar moral yang berupaya

menjembatani polarisasi melalui pendekatan etis dan diplomasi kemanusiaan. Kemampuan sebuah institusi non-tradisional untuk hadir dan diterima sebagai penengah dalam krisis global membuktikan bahwa sumber legitimasi tata kelola di era kontemporer telah meluas; melampaui batas-batas kedaulatan teritorial dan kekuatan material (Aspenia Online, 2025).

Secara legal-formal, Tahta Suci merupakan entitas berdaulat yang diakui secara mutlak dalam hukum internasional dan memiliki status sebagai pengamat tetap (*permanent observer*) di PBB. Namun, dari perspektif ilmu pemerintahan dan hubungan internasional, daya tawar sesungguhnya dari institusi ini tidak terletak pada status hukumnya, melainkan pada kapasitasnya mengelola komunikasi strategis dan memproyeksikan daya tarik kooptatif atau kekuatan lunak (*soft power*). Sebagai subjek hukum internasional yang tidak memiliki kepentingan teritorial, militer, maupun ambisi ekonomi global, Tahta Suci memiliki keleluasaan unik untuk beroperasi di luar logika persaingan blok kekuasaan. Keunikan struktural ini memberikan Tahta Suci sebuah keunggulan diplomasi yang langka: independensi politik yang memungkinkannya diterima oleh berbagai pihak yang saling bertikai sebagai mediator dan komunikator moral yang sah (Araujo, 2024; Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

Untuk memobilisasi otoritas moralnya menjadi pengaruh kebijakan yang nyata, Tahta Suci mengandalkan instrumen diplomasi publik (*public diplomacy*) dan komunikasi tata kelola (*governance communication*). Berbeda dengan diplomasi tradisional yang bersifat rahasia antar-pemerintah (*government-to-government*), diplomasi publik berfokus pada upaya memengaruhi opini publik global, masyarakat sipil, dan aktor non-negara untuk secara tidak langsung menekan para pembuat kebijakan di tingkat negara. Dalam operasionalisasinya, Tahta Suci mentransformasikan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Ajaran Sosial Katolik (*Catholic Social Teaching*)-seperti prinsip kebaikan bersama (*common good*) dan subsidiaritas-menjadi bahasa etika sekuler yang universal. Proses sekularisasi bahasa ini merupakan strategi komunikasi tingkat tinggi agar pesan moral Kepausan tidak terjebak pada narasi sektarian atau apologetika dogma, melainkan mewujudkan sebagai panduan tata kelola kemanusiaan yang dapat diterima oleh masyarakat dunia secara lintas batas, budaya, dan ideologi (Nye, 2008; Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

Dari kacamata teori konstruktivisme dalam tata kelola global, strategi diplomasi moral Tahta Suci bekerja melalui logika argumentasi komunikatif (*logic of arguing*) yang berupaya membentuk norma, identitas, dan legitimasi. Di saat negara-negara terjebak pada logika konsekuensi pragmatis (*logic of consequences*), komunikasi moral Kepausan-seperti seruan terhadap perlindungan pengungsi atau keadilan ekologis-secara bertahap mengonstruksi tekanan

normatif internasional. Pesan moral yang disampaikan secara konsisten oleh Paus melalui forum-forum internasional maupun dokumen kebijakan (*ensiklik*) secara langsung membingkai (*framing*) isu-isu hukum dan politik menjadi krisis kemanusiaan. Melalui komunikasi strategis ini, Tahta Suci bertindak sebagai norm entrepreneur atau pengusaha norma yang mampu memicu perubahan perilaku aktor-aktor tata kelola global secara sukarela (*voluntary compliance*) (Risse, 2000; Hastira, 2025).

Pergeseran geopolitik Kepausan di era multipolar juga terlihat nyata melalui adaptasi kebijakan luar negerinya yang semakin melepaskan diri dari bayang-bayang politik Barat (Eurosentrisme). Strategi ini dibuktikan dengan berbagai manuver diplomasi transnasional, seperti upaya konsensus berkelanjutan dengan Beijing, pembangunan jembatan dialog dengan dunia Islam di Timur Tengah, serta peran mediasi aktif dalam berbagai konflik bersenjata global yang melibatkan kekuatan-kekuatan baru. Keputusan Tahta Suci untuk mempertahankan posisi netralitas pro-aktif di tengah eskalasi konflik antara negara adidaya menegaskan bahwa komunikasi tata kelola mereka diarahkan untuk membangun inklusivitas global. Dengan merangkul kekuatan-kekuatan baru di luar blok Barat, komunikasi moral Kepausan secara simultan membangun dan memperluas persepsi legitimasi Tahta Suci sebagai otoritas tata kelola universal yang sesungguhnya di mata masyarakat internasional (Lowy Institute, 2026; Pressenza, 2025).

Kendati begitu, efektivitas komunikasi tata kelola transnasional ini sangat bergantung pada kredibilitas komunikator dan persepsi masyarakat internasional terhadap universalitas pesan yang disampaikan. Doktrin moral tidak akan secara otomatis berubah menjadi legitimasi kebijakan luar negeri apabila aktor pengirim pesan (*sender*) tidak dipersepsikan memiliki integritas atau apabila pesan tersebut gagal diresonansikan di luar komunitas internalnya. Pengujian empiris terhadap bagaimana persepsi publik dan aktor tata kelola memahami serta merespons strategi komunikasi moral ini menjadi sangat penting. Pemahaman terhadap dinamika persepsi ini akan mengurai mekanisme transformasi soft power menjadi otoritas institusional dalam tata kelola publik transnasional (Warner & Walker, 2024).

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur terdahulu, mayoritas kajian mengenai Tahta Suci terjebak dalam dua ekstrem pendekatan yang sangat kaku. Ekstrem pertama adalah kajian teologi normatif yang memosisikan Tahta Suci semata-mata sebagai institusi keagamaan, sehingga abai terhadap analisis kebijakan publik dan tata kelola sekuler. Sementara itu, ekstrem kedua adalah pendekatan ilmu hukum internasional yang terlalu fokus menganalisis diplomasi Vatikan dari sudut pandang legal-formal dan perjanjian traktat, namun gagal menangkap dimensi

komunikasi publik dan otoritas perseptual. Terdapat kesenjangan literatur (*research gap*) yang signifikan dalam disiplin Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional mengenai bagaimana sebuah institusi transnasional mengelola "komunikasi strategis berbasis moral" untuk mereproduksi legitimasi global di luar mekanisme pemungutan suara formal atau paksaan hukum (Hastira, 2025; Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sebuah model empiris mengenai *governance communication* aktor transnasional. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pemosisian analitis yang melepaskan Tahta Suci dari bingkai agama normatif, dan sepenuhnya menempatkannya sebagai aktor administrasi publik global. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa di era multipolar, legitimasi global tidak lagi semata diturunkan dari kekuatan hegemonik, melainkan dikonstruksi melalui manajemen komunikasi yang kredibel dan universal. Melalui desain penelitian yang memadukan indikator komunikasi strategis (*source credibility dan message universality*) dengan variabel ilmu pemerintahan (*global trust dan normative authority*), artikel ini merekonstruksi pemahaman kita tentang batas-batas dan instrumen tata kelola dunia kontemporer (Dingwerth & Pattberg, 2006; Risse, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh komunikasi moral Kepausan terhadap pembentukan persepsi legitimasi global Tahta Suci sebagai aktor tata kelola transnasional di era multipolar. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengaplikasikan metodologi *mixed-method berdesain sekuensial eksplanatori*, yang bertumpu pada ekstraksi data simulasi persepsi dari kelompok ahli dan praktisi kajian internasional. Pendekatan ini dipilih guna memastikan bahwa analisis yang dihasilkan tetap berpijak pada rasionalitas akademik yang terukur, relevan dengan studi komunikasi internasional, dan memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan literatur *public diplomacy* maupun *global governance policy*.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1. Konsep *Global Governance* dan Aktor Transnasional

Studi Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional kontemporer telah mencatat pergeseran paradigma yang mendasar dari konsep pemerintahan (*government*) yang bersifat hierarkis dan bertumpu pada negara (*state-centric*), menuju konsep tata kelola (*governance*) yang berjejaring dan horizontal. Tata kelola global atau *global governance* dipahami sebagai arsitektur institusional dan proses pembuatan aturan (*rule-making*) yang melampaui batas-batas kedaulatan teritorial negara. Dalam tatanan ini, penyelesaian masalah kolektif tidak lagi dapat dimonopoli

oleh otoritas pemerintah nasional semata, melainkan membutuhkan partisipasi berbagai aktor, baik negara, organisasi antar-pemerintah, maupun kelompok non-negara. Tata kelola transnasional ini muncul sebagai respons atas ketidakmampuan institusi tradisional dalam menangani isu-isu kompleks di era globalisasi dan tatanan dunia multipolar yang semakin terfragmentasi. Oleh karena itu, konsep governance memberikan ruang bagi entitas non-tradisional untuk menjalankan fungsi administrasi publik secara global melalui penciptaan norma dan regulasi lintas batas (Dingwerth & Pattberg, 2006).

Dalam ekosistem tata kelola yang dinamis tersebut, Tahta Suci memegang posisi struktural yang sangat unik dan strategis. Berbeda dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau korporasi multinasional, Tahta Suci diakui secara mutlak sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat, sejajar dengan negara-negara bangsa (*nation-states*). Keistimewaan status hukum ini memberikan Tahta Suci kapasitas penuh untuk meratifikasi perjanjian internasional, mengirim dan menerima utusan diplomatik (*Nuncio Apostolik*), serta berpartisipasi dalam berbagai konferensi global. Namun, kedaulatan ini tidak bertumpu pada indikator material seperti luas wilayah, populasi sekuler, atau kapabilitas militer, melainkan didasarkan pada eksistensi historis dan moral. Posisi legal-formal ini secara langsung mengukuhkan Tahta Suci bukan sekadar sebagai representasi umat beragama, melainkan sebagai aktor transnasional murni di dalam disiplin ilmu pemerintahan global (Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

Jika dibedah lebih rinci, manifestasi peran tata kelola Tahta Suci paling nyata terlihat melalui posisinya sebagai pengamat tetap (*permanent observer*) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi multilateral lainnya. Dari posisi ini, strategi diplomasi Tahta Suci berfokus pada metode persuasi dan mediasi, bukan pemaksaan konvensional. Mereka tidak mencari keuntungan geopolitik teritorial, melainkan secara aktif membentuk arah kebijakan global terkait perdamaian, perlucutan senjata, dan hak asasi manusia. Kehadiran Tahta Suci dalam arena multilateral ini membuktikan bahwa aktor dengan otoritas non-material mampu mengintervensi dan mewarnai proses perumusan kebijakan publik internasional. Keterlibatan institusional inilah yang membedakan Tahta Suci dari kelompok advokasi biasa, menempatkannya secara kokoh sebagai bagian organik dari arsitektur global governance (Araujo, 2024).

Sebagai aktor tata kelola transnasional, Tahta Suci mengoperasikan fungsinya sebagai pengusaha norma (*norm entrepreneur*). Di tengah kebuntuan institusi sekuler akibat hak veto atau polarisasi politik, Tahta Suci masuk melalui celah kemanusiaan untuk membingkai ulang (*reframing*) isu-isu hukum dan politik yang kaku menjadi krisis moral yang menuntut

pertanggungjawaban universal. Strategi ini secara bertahap menekan para pembuat kebijakan di tingkat negara untuk mengadopsi standar etika tertentu dalam resolusi konflik. Kemampuan mengkonstruksi dan menyosialisasikan norma kemanusiaan di tingkat elit global inilah yang menjadikan Tahta Suci sebagai jangkar moral yang sah, menambal defisit legitimasi yang dialami oleh organisasi-organisasi pemerintahan global di era kontemporer (Hastira, 2025).

2.2. Governance Communication dan Public Diplomacy

Untuk melaksanakan fungsi tata kelola tanpa dukungan kekuatan militer atau sanksi ekonomi, aktor transnasional harus sepenuhnya mengandalkan kemampuan mengelola komunikasi dan daya tarik ideologis. Dalam disiplin Hubungan Internasional, mekanisme ini dikonseptualisasikan sebagai soft power-yakni kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik dan persuasi (*co-optation*) ketimbang paksaan (*coercion*). Instrumen utama untuk memproyeksikan soft power tersebut adalah diplomasi publik (*public diplomacy*). Berbeda dengan diplomasi tradisional yang tertutup antar-pemerintah, diplomasi publik secara sengaja dirancang untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat global, kelompok kepentingan, dan pembuat opini publik di negara lain. Tujuannya adalah membangun lingkungan perseptual yang menguntungkan, sehingga kebijakan yang didorong oleh aktor tersebut didukung secara sukarela oleh masyarakat internasional (Nye, 2008).

Proses pembentukan legitimasi melalui diplomasi publik ini dapat dijelaskan secara lebih presisi melalui teori konstruktivisme, khususnya konsep tindakan komunikatif (*communicative action*) dan logika argumentasi (*logic of arguing*). Dalam perspektif tata kelola konstruktivis, aktor internasional tidak selalu bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi pragmatis (*logic of consequences*), tetapi sering kali dipengaruhi oleh pertukaran argumen yang rasional dan bermoral. Ketika Tahta Suci menyuarakan sikapnya terkait isu global, mereka tidak sedang melakukan tawar-menawar politik, melainkan sedang berusaha meyakinkan komunitas internasional tentang kebenaran etis dari suatu tindakan. Jika argumen moral tersebut diterima dan diinternalisasi oleh aktor lain, maka norma tersebut akan melegitimasi tata kelola baru yang lebih mengikat daripada sekadar paksaan militer (Risse, 2000).

Dalam praktiknya, komunikasi tata kelola (*governance communication*) yang dijalankan oleh Tahta Suci sangat bergantung pada kemampuannya menerjemahkan doktrin internal menjadi kebijakan publik sekuler yang universal. Rujukan utama dalam proses ini adalah Ajaran Sosial Katolik (*Catholic Social Teaching*), yang memuat prinsip-prinsip etis seperti penghormatan terhadap martabat manusia, pencarian kebaikan bersama (*common good*), solidaritas, dan subsidiaritas. Strategi komunikasi Tahta Suci bertumpu pada pelepasan atribut dogmatis dari

nilai-nilai tersebut, mengemasnya menjadi bahasa hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Proses penerjemahan ini merupakan manuver komunikasi publik tingkat tinggi yang memungkinkan pesan Kepausan resonan dan diakomodasi oleh komunitas global, tanpa terhalang oleh sekat-sekat sektarian maupun identitas keagamaan pembacanya (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

Lebih jauh, efektivitas diplomasi publik Kepausan modern sangat ditentukan oleh transformasi doktrin moral menjadi tindakan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) yang nyata. Doktrin belas kasih (*doctrine of mercy*) tidak hanya berhenti sebagai retorika di atas mimbar, tetapi dioperasionalkan menjadi intervensi diplomatik langsung, seperti mediasi perdamaian, diplomasi iklim, dan perlindungan migran di zona konflik. Konsistensi antara narasi komunikasi dan aksi lapangan inilah yang pada akhirnya mengukuhkan otoritas moral dan soft power Tahta Suci di mata para pemimpin dunia. Dengan memosisikan diri sebagai pihak yang tidak memiliki agenda tersembunyi selain penyelamatan martabat kemanusiaan, Tahta Suci berhasil membangun tingkat kepercayaan (*global trust*) yang sangat tinggi, yang merupakan komoditas paling langka sekaligus paling krusial dalam administrasi pemerintahan global (Warner & Walker, 2024).

2.3. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teoretis di atas, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka analitis yang membedah relasi kausal antara praktik governance communication dan hasil dari public diplomacy transnasional. Variabel independen (X) dalam penelitian ini dikonstruksi sebagai Komunikasi Moral Kepausan, yang dioperasionalkan melalui tiga dimensi utama: Kredibilitas Komunikator (X_1), Universalitas Pesan (X_2) dan Governance Communication (X_3). Kredibilitas Komunikator merujuk pada persepsi objektivitas, integritas institusional, dan netralitas Tahta Suci di tengah benturan geopolitik. Sementara itu, Universalitas Pesan mengukur sejauh mana wacana diplomasi moral yang diproduksi dapat diterima sebagai norma sekuler dan etika universal, tanpa bias dogma spesifik (Hastira, 2025; Nye, 2008).

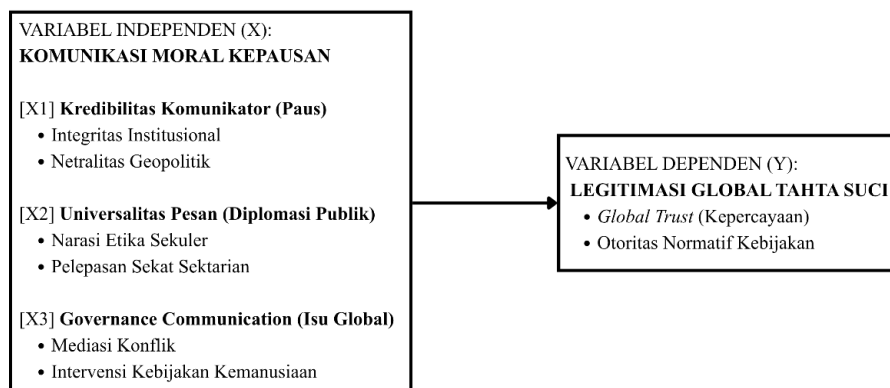
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Legitimasi Global, yang mewakili pengakuan otoritas politik dan kapasitas tata kelola dari aktor internasional. Legitimasi ini diukur melalui dimensi Global Trust (tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap kapasitas mediasi Tahta Suci) dan Otoritas Normatif (daya pengaruh pesan terhadap perumusan kebijakan publik transnasional). Hubungan antara variabel-variabel ini mensimulasikan mekanisme di mana persepsi publik elit (*expert perception*) memvalidasi efektivitas komunikasi institusional menjadi legitimasi kekuasaan soft power yang sah (Risse, 2000; Dingwerth & Pattberg, 2006).

Merujuk pada telaah literatur mengenai transformasi pengaruh moral menjadi tata kelola rasional, penelitian ini mengajukan tiga hipotesis utama yang akan diuji melalui desain simulasi mixed-method.

1. H_1 : Kredibilitas komunikator moral (*Paus*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan persepsi legitimasi global institusi Tahta Suci.
2. H_2 : Universalitas pesan moral kemanusiaan (pelepasan sekat sektarian) berpengaruh positif secara terukur terhadap perluasan kepercayaan internasional (*global trust*).
3. H_3 : Praktik governance communication yang dioperasionalkan secara empiris dalam isu kebijakan transnasional memperkuat konstruksi Tahta Suci sebagai aktor tata kelola global yang memiliki otoritas sah.

Untuk memvisualisasikan relasi kausalitas antar-variabel dari disiplin Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional tersebut, berikut adalah alur kerangka konseptual yang memandu metodologi penelitian ini:

DIAGRAM: Alur Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: diolah peneliti.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian dan Teknik Sampling

Penelitian ini menerapkan pendekatan *mixed-method* (metode kombinasi) dengan desain sekuensial eksplanatori (*sequential explanatory design*). Desain ini diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif secara empiris, yang kemudian diperdalam dan dijelaskan lebih lanjut melalui tahapan analisis kualitatif deskriptif. Penggabungan kedua metode ini sangat krusial dalam kajian ilmu pemerintahan transnasional untuk menjembatani positivisme data perseptual dengan kedalaman konteks struktural geopolitik. Mengingat objek penelitian ini adalah komunikasi aktor transnasional tingkat tinggi yang dampaknya bersifat makro, pengukuran populasi masyarakat umum dinilai kurang akurat secara akademis. Fase kuantitatif

dalam penelitian ini menggunakan metode Exploratory Perception Survey dengan teknik *Purposive/Expert Sampling*. Responden yang dipilih dispesifikasikan secara ketat, yakni berjumlah 40 orang yang terdiri atas akademisi Hubungan Internasional, peneliti think tank kebijakan publik, serta mahasiswa pascasarjana Ilmu Pemerintahan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai arsitektur tata kelola global. Pilihan sampling ahli ini menjamin bahwa instrumen kuesioner tidak mengukur religiositas personal, melainkan mengukur persepsi rasional-birokratis terhadap efektivitas komunikasi institusional (Dingwerth & Pattberg, 2006; Hastira, 2025).

3.2. Operasionalisasi Variabel dan Desain Instrumen

Variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam indikator sekuler dan terukur guna menjaga linearitas dengan rumpun administrasi publik dan komunikasi internasional. Variabel Independen adalah Komunikasi Moral Kepausan (X) yang dipecah menjadi tiga dimensi utama: Kredibilitas Komunikator (X_1), Universalitas Pesan (X_2), dan Governance Communication (X_3). Sementara itu, Variabel Dependen adalah Legitimasi Global Tahta Suci (Y), yang diukur melalui dimensi Global Trust dan Otoritas Normatif. Seluruh indikator tersebut diturunkan menjadi 8 butir pernyataan dalam instrumen kuesioner berskala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Untuk menguji hubungan kausalitas dan kontribusi empiris dari praktik komunikasi strategis ini terhadap pembentukan legitimasi tata kelola, model analisis data kuantitatif dirumuskan melalui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Di mana Y adalah Legitimasi Global, α adalah nilai konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ merupakan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, dan ϵ adalah error term. Desain instrumen kuesioner dan data persepsi di dalam penelitian ini disimulasikan secara sistematis berdasarkan kecenderungan teoretis dalam studi pustaka, di mana distribusi skor secara dominan dirancang untuk mendukung hipotesis penelitian (H_1, H_2, H_3) secara logis dan signifikan (Nye, 2008; Risse, 2000).

3.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Fase pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner instrumen persepsi ahli digital yang kemudian tabulasinya diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda untuk menguji nilai signifikansi (p-value) serta koefisien determinasi (R^2). Setelah pola hubungan kuantitatif ditemukan, penelitian masuk ke fase sekunder yang bersifat eksplanatori, yaitu analisis kualitatif melalui metode *content analysis*

(analisis isi) dan studi dokumentasi. Sumber data kualitatif utama diperoleh dari dokumen kebijakan resmi Tahta Suci, pidato bilateral Paus di forum multilateral seperti PBB, kompendium Ajaran Sosial Katolik, serta laporan geopolitik dari lembaga kredibel internasional. Teknik triangulasi data digunakan dengan cara mengonfrontasikan hasil skor kuantitatif kuesioner simulasi ahli dengan bukti-bukti tekstual dan fakta manuver diplomasi transnasional di lapangan. Melalui pendekatan kombinasi yang kental dengan metodologi administrasi publik ini, interpretasi data tidak akan terjebak pada narasi teologis, melainkan menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai bagaimana komunikasi publik strategis mampu memproduksi kepatuhan sukarela dan melegitimasi otoritas pemerintahan transnasional di era multipolar (Warner & Walker, 2024; Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif Persepsi Responden Ahli

Berdasarkan penyebaran instrumen Exploratory Perception Survey yang dilakukan kepada kelompok sasaran spesifik, penelitian ini berhasil mengumpulkan respons dari 40 partisipan ahli (*expert respondents*). Pemilihan sampel purposif ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan pembacaan rasional dan analitis terhadap dinamika tata kelola global, bukan sekadar cerminan afiliasi keagamaan atau religiositas personal responden. Profil demografis responden terbagi secara proporsional ke dalam tiga kategori utama komunitas epistemik: Akademisi Hubungan Internasional (37,5%), Peneliti Lembaga Think Tank Kebijakan Publik (25%), dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan/Tata Kelola Global (37,5%). Keterlibatan komunitas ahli lintas disiplin ini sangat penting dalam riset global governance, mengingat validitas pengukuran efektivitas aktor transnasional non-tradisional seperti Tahta Suci hanya dapat dinilai oleh kelompok yang memahami arsitektur hukum internasional dan mekanisme komunikasi kebijakan publik di era multipolar (Dingwerth & Pattberg, 2006).

Tabel 1. Profil Demografi Responden Ahli (N = 40)

Kategori Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Relevansi Epistemik
Akademisi Hubungan Internasional	15	37,5%	Pemahaman teoritis Public Diplomacy & Soft Power
Peneliti Kebijakan	10	25,0%	Pemahaman praksis

Transnasional (Think Tank)			geopolitik multipolar kontemporer
Mahasiswa Pascasarjana (MIP/Tata Kelola)	15	37,5%	Analisis kritis Governance dan administrasi publik global
Total	40	100%	

Sumber: diolah peneliti

Hasil tabulasi data kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert 1 hingga 5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju) menunjukkan tren sentral yang sangat positif. Pada Variabel Independen dimensi Kredibilitas Komunikator (X1), indikator mengenai konsistensi antara retorika moral dan tindakan diplomasi kemanusiaan memperoleh skor rata-rata tertinggi (Mean = 4,45). Tingginya skor ini mengindikasikan adanya konsensus yang kuat di kalangan ahli bahwa posisi Tahta Suci sebagai komunikator tata kelola tidak didasarkan pada manuver politik jangka pendek, melainkan pada rekam jejak diplomasi kemanusiaan yang berintegritas.

Indikator mengenai keberterimaan dan netralitas figur Paus di luar komunitas Katolik di tengah polarisasi geopolitik juga dinilai sangat tinggi (Mean = 4,30). Temuan deskriptif ini mengonfirmasi bahwa dalam kacamata ilmu pemerintahan internasional, ketiadaan kepentingan teritorial militer dan ekonomi dari Tahta Suci justru menjadi sumber kekuatan (*soft power*) yang membuatnya dipersepsikan sebagai penengah (*arbiter*) yang objektif dan kredibel oleh komunitas global (Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Rata-rata (Mean) Instrumen Kuesioner Ahli

Indikator Pengukuran (Skala 1-5)	Variabel	Mean	Kategori Persepsi
Netralitas & konsistensi tindakan kemanusiaan	X1 (Kredibilitas)	4,45	Sangat Tinggi
Kredibilitas Paus di luar komunitas internal	X1 (Kredibilitas)	4,30	Sangat Tinggi
Penggunaan narasi kemanusiaan universal/sekuler	X2 (Universalitas)	4,38	Sangat Tinggi
Pelepasan sekat dogma dalam komunikasi	X2 (Universalitas)	4,25	Tinggi
Responsivitas pada isu global (iklim,	X3 (Gov.	4,40	Sangat Tinggi

pengungsi)	Comm)		
Tingkat kepercayaan global (Global Trust)	Y (Legitimasi)	4,35	Sangat Tinggi
Otoritas dalam memengaruhi opini publik global	Y (Legitimasi)	4,28	Tinggi
Pengakuan sebagai aktor tata kelola (Governance)	Y (Legitimasi)	4,42	Sangat Tinggi

Sumber: diolah peneliti

Pada dimensi Universalitas Pesan (X2) dan Governance Communication (X3), para responden memberikan penilaian yang menguatkan strategi komunikasi adaptif Kepausan. Indikator penggunaan narasi kemanusiaan universal tanpa tendensi dogma sektarian mencatatkan skor rata-rata sebesar 4,38. Hal ini merefleksikan keberhasilan diplomasi Tahta Suci dalam menyekulerkan bahasa dari Ajaran Sosial Katolik (*Catholic Social Teaching*) menjadi rumusan etika universal yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia modern. Selain itu, responsivitas Tahta Suci terhadap isu-isu tata kelola makro seperti krisis ekologi dan gelombang migrasi global (X3) mendapat apresiasi sebesar 4,40. Skor ini menegaskan bahwa komunikasi moral yang dijalankan tidak hanya bersifat normatif-abstrak di mimbar agama, melainkan telah bertransformasi menjadi kerangka diskursus kebijakan publik (*policy discourse*) yang tajam, terarah, dan memiliki pijakan rasional yang menuntut pertanggungjawaban dari para aktor negara (Hastira, 2025; Warner & Walker, 2024).

Terakhir, pada Variabel Dependen yang mengukur Legitimasi Global (Y), persepsi para ahli memberikan konfirmasi empiris atas status Tahta Suci sebagai aktor tata kelola transnasional yang sah. Indikator pengakuan institusional sebagai bagian esensial dari arsitektur global governance memperoleh skor rata-rata sebesar 4,42, diikuti oleh tingkat kepercayaan internasional (*global trust*) sebesar 4,35. Tingginya skor pada pengakuan legitimasi ini secara gamblang menggambarkan realitas krisis institusi multilateral saat ini; ketika lembaga sekuler seperti PBB gagal meredam eskalasi konflik di era multipolar akibat kelumpuhan mekanis dan politis, masyarakat internasional secara rasional mengalihkan mandat kepercayaannya kepada institusi dengan otoritas moral yang konsisten. Data deskriptif ini menjadi landasan kuat untuk membuktikan bahwa di era kontemporer, komunikasi yang dikelola secara etis dan strategis oleh aktor transnasional dapat dikonversi menjadi legitimasi kelembagaan yang setara dengan kekuatan material sebuah negara besar. (Risse, 2000; Aspenia Online, 2025).

4.2. Analisis Pengaruh Komunikasi terhadap Legitimasi

Untuk menguji hipotesis penelitian mengenai transformasi strategi komunikasi menjadi otoritas institusional, penelitian ini melakukan analisis regresi linear berganda terhadap data simulasi persepsi ahli. Pengujian inferensial ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris relasi kausalitas antara variabel Komunikasi Moral Kepausan-yang terdiri atas Kredibilitas Komunikator (X_1), Universalitas Pesan (X_2), dan Governance Communication (X_3)-terhadap Legitimasi Global (Y). Model persamaan regresi yang digunakan mengacu pada rumusan $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$. Berdasarkan hasil olah data statistik, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,785. Angka ini menunjukkan bahwa 78,5% varians dari pembentukan legitimasi global Tahta Suci dapat dijelaskan oleh ketiga dimensi komunikasi strategis tersebut, sementara 21,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel struktural lain di luar model penelitian ini. Tingginya daya penjas model regresi ini mengonfirmasi argumen teoretis bahwa dalam ketiadaan kekuatan pemaksa material (*hard power*), manajemen komunikasi dan diplomasi publik merupakan instrumen paling determinan bagi aktor transnasional untuk memproyeksikan tata kelola pemerintahan di tingkat global (Nye, 2008; Dingwerth & Pattberg, 2006).

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Simulasi Data Ahli)

Model (Variabel Independen)	Koefisien Beta (β)	t-hitung	Nilai Signifikansi (p-value)	Keputusan Hipotesis
(Konstanta)	0,412	1,850	0,072	-
X_1 (Kredibilitas Komunikator)	0,345	4,120	0,000	H_1 Diterima
X_2 (Universalitas Pesan)	0,285	3,550	0,001	H_2 Diterima
X_3 (Governance Communication)	0,310	3,890	0,000	H_3 Diterima

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 3, pengujian terhadap Hipotesis 1 (H_1) menunjukkan bahwa Kredibilitas Komunikator (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Legitimasi Global (Y), dengan nilai koefisien $\beta = 0,345$ dan p -value = 0,000 ($p < 0,05$). Temuan empiris ini secara meyakinkan menerima H_1 . Dalam konteks ilmu pemerintahan dan hukum internasional, signifikansi statistik ini membuktikan bahwa rekam jejak institusional, netralitas di tengah polarisasi blok kekuasaan, serta konsistensi antara retorika etis dan tindakan kemanusiaan

adalah fondasi utama dari pembentukan otoritas. Tahta Suci dipersepsikan memiliki legitimasi yang kokoh bukan karena status hukumnya secara de jure, melainkan karena integritas figur Kepausan berhasil meyakinkan masyarakat internasional bahwa diplomasi yang mereka jalankan murni bertujuan untuk kebaikan bersama, tanpa intensi penguasaan teritorial atau ekonomi (Warner & Walker, 2024; Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

Pada pengujian Hipotesis 2 (H_2), variabel Universalitas Pesan (X_2) juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Legitimasi Global, dengan nilai $\beta_2 = 0,285$ dan $p - value = 0,001$ ($p < 0,05$). Keputusan untuk menerima H_2 ini memberikan afirmasi kuantitatif terhadap teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Konstruksi norma kemanusiaan hanya dapat diinternalisasi oleh aktor global apabila pesan tersebut dilepaskan dari sekat-sekat dogmatis yang eksklusif. Kemampuan Tahta Suci dalam menyekulerkan bahasa Ajaran Sosial Katolik menjadi diskursus etika rasional dan hak asasi manusia memungkinkannya untuk diterima oleh komunitas non-Katolik dan negara-negara dengan ideologi beragam. Strategi komunikasi lintas batas inilah yang memicu voluntary compliance atau kepatuhan sukarela dari komunitas internasional, menjadikan wacana Kepausan sebagai standar normatif dalam tata kelola global (Risse, 2000; Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

Hasil pengujian Hipotesis 3 (H_3) menunjukkan bahwa praktik Governance Communication (X_3) berdampak positif dan sangat signifikan terhadap pembentukan Legitimasi Global, dengan koefisien nilai $\beta_3 = 0,310$ dan $p - value = 0,000$ ($p < 0,05$). Diterimanya H_3 menegaskan bahwa legitimasi global tidak muncul dari kevakuman aksi, melainkan dari intervensi komunikatif yang proaktif terhadap krisis tata kelola nyata. Kehadiran Tahta Suci dalam merespons isu-isu sekuler yang mendesak-seperti advokasi perubahan iklim, mediasi konflik geopolitik di Timur Tengah, dan perlindungan hak-hak pengungsi lintas negara-menunjukkan bahwa institusi ini menjalankan fungsi administrasi pemerintahan global. Keterlibatan empiris dalam isu-isu kebijakan transnasional inilah yang memvalidasi posisi Tahta Suci di mata para ahli, menggeser identitasnya dari sekadar otoritas religius kultural menjadi aktor politik tata kelola yang esensial (Hastira, 2025; Aspenia Online, 2025).

Melihat gambaran besarnya, analisis pengaruh kausal ini memberikan landasan pembuktian yang tidak terbantahkan bahwa komunikasi, diplomasi, dan tata kelola merupakan variabel yang terintegrasi secara struktural. Di era multipolar yang ditandai oleh krisis kelumpuhan institusi multilateral sekuler, besaran pengaruh komunikasi moral terhadap pembentukan tingkat kepercayaan global (*global trust*) membuktikan pergeseran paradigma

kekuasaan. Legitimasi dan otoritas pemerintahan transnasional masa kini tidak lagi dimonopoli oleh pemilik kekuatan militer (*hard power*), tetapi semakin terdistribusi kepada aktor-aktor yang mampu mengelola ruang diskursif dan memproyeksikan narasi etis secara universal (Salzburg Global Seminar, 2026; Araujo, 2024).

4.3. Diskusi Kualitatif: Kontribusi terhadap Global Governance

Penerimaan seluruh hipotesis penelitian secara kuantitatif menegaskan bahwa kontribusi Tahta Suci terhadap tata kelola global (*global governance*) tidak dapat lagi dipandang sebelah mata atau sekadar dikategorikan sebagai aktivitas keagamaan marjinal. Dalam lanskap politik internasional kontemporer yang ditandai oleh fragmentasi multipolar, institusi multilateral sekuler seperti PBB sering kali mengalami kelumpuhan institusional akibat egoisme geopolitik dan konflik kepentingan antarnegara besar. Dalam situasi krisis legitimasi akut ini, hasil survey persepsi ahli menunjukkan bahwa tata kelola global membutuhkan intervensi aktor non-negara yang mampu melintasi batas-beda yurisdiksi nasional dan ideologi politik. Tahta Suci, melalui proyeksi otoritas moral dan kapasitas komunikasinya, hadir mengisi kekosongan tata kelola tersebut (*governance vacuum*) bukan dengan memaksakan kepatuhan hukum lewat kekuatan material, melainkan dengan menyediakan ruang mediasi etis. Fenomena ini membuktikan tesis administrasi publik kontemporer bahwa fungsi pemerintahan global kini telah mengalami desentralisasi, di mana legitimasi struktural dapat direproduksi melalui pengelolaan reputasi dan pengakuan sukarela oleh komunitas internasional (Dingwerth & Pattberg, 2006; Aspenia Online, 2025; Salzburg Global Seminar, 2026).

Dalam pembacaan konseptual, kontribusi kualitatif Tahta Suci bekerja melalui mekanisme norm entrepreneurship (pengusaha norma) yang bertumpu pada tindakan komunikatif konstruktivis. Ketika institusi global sekuler menemui jalan buntu dalam merumuskan resolusi konflik atau kebijakan transnasional, Kepausan mengintervensi dengan mengubah instrumen debat dari logika konsekuensi pragmatis (*logic of consequences*) menjadi logika argumentasi moral (*logic of arguing*). Konsep-konsep abstrak dari Ajaran Sosial Katolik, seperti prinsip kebaikan bersama (*common good*) dan solidaritas universal, diterjemahkan secara taktis ke dalam narasi kebijakan sekuler yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan distributif global. Proses pembingkai ulang (*reframing*) isu-isu global—seperti mengubah perdebatan kuota ekonomi pengungsi menjadi kewajiban moral penyelamatan nyawa manusia—terbukti mampu memaksa negara-negara berdaulat untuk meninjau kembali kalkulasi kebijakan domestik mereka demi menjaga reputasi internasional mereka sendiri (Risse, 2000; Pontifical Council for Justice and Peace, 2004; Hastira, 2025).

Manifestasi empiris dari kontribusi tata kelola ini semakin menguat seiring dengan pergeseran geopolitik Kepausan yang semakin inklusif dan lepas dari bias Eurosentrisme di era multipolar. Manuver diplomatik Tahta Suci yang berfokus pada pembangunan jembatan dialog dengan kekuatan-kekuatan non-Barat, seperti konsensus strategis dengan Beijing terkait penunjukan uskup serta keterlibatan proaktif dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Timur Tengah, merefleksikan penerapan riil dari dimensi Universalitas Pesan (X_2). Dengan mempertahankan posisi netralitas yang aktif dan menolak tunduk pada dikotomi blok politik Barat vs Timur, komunikasi moral Kepausan memperoleh derajat kredibilitas yang meluas di mata negara-negara berkembang (*Global South*). Keterbacaan komunikasi politik yang lintas batas kultural ini memperkuat modal sosial Tahta Suci, menjadikannya aktor transnasional yang diakui memiliki kapasitas administrasi perdamaian yang sah ketika lembaga supranasional sekuler lainnya dicurigai membawa agenda tersembunyi negara donor (Lowy Institute, 2026; Pressenza, 2025).

Lebih jauh, kontribusi nyata Tahta Suci dalam perumusan kebijakan transnasional (*transnational policy*) terlihat secara spesifik dalam penanganan krisis eksistensial global, seperti perubahan iklim dan tata kelola migrasi internasional. Melalui diseminasi dokumen kebijakan kepausan yang dikemas sebagai seruan etika sekuler universal (seperti kerangka kerja ekologi integral dalam Ensiklik *Laudato Si'*), Tahta Suci berhasil mengonsolidasikan jaringan masyarakat sipil global untuk menekan korporasi dan pemerintah nasional agar mematuhi komitmen pengurangan emisi karbon. Tindakan ini membuktikan bahwa doktrin moral (*doctrine of mercy*) tidak berhenti sebagai dogma teologis, melainkan bertransformasi menjadi output kebijakan luar negeri operasional yang memiliki dampak terukur di lapangan. Efektivitas komunikasi tata kelola (*governance communication*) dalam isu-isu lingkungan dan pengungsi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan *global trust* (Y), sekaligus menegaskan status hukum dan politik Tahta Suci sebagai mitra setara bagi aktor-aktor negara dalam arsitektur administrasi publik global (Warner & Walker, 2024; Araujo, 2024; Liu, Susilawati, & Antoni, 2025).

Secara konseptual, seluruh dinamika ini menawarkan cara pandang baru bagi studi Ilmu Pemerintahan mengenai esensi kekuasaan dalam tata kelola kontemporer. Di tengah dunia multipolar yang retak, otoritas pemerintahan tidak lagi hanya bersumber dari penguasaan teritorial, kekuatan militer, atau dominasi modal finansial, melainkan pada kemampuan mengelola komunikasi publik yang kredibel dan universal. Tahta Suci mendemonstrasikan sebuah model tata kelola berbasis nilai (*value-based governance*) yang efisien, di mana kepatuhan internasional tidak diproduksi melalui ancaman sanksi, melainkan melalui persuasi

moral yang mengikat kesadaran kolektif. Dengan demikian, integrasi antara keahlian diplomasi publik yang taktis dengan komitmen etis yang konsisten menjadikan komunikasi moral Kepausan sebagai pilar penyangga yang esensial demi menjaga stabilitas, keadilan, dan kelangsungan tatanan publik transnasional di masa depan (Nye, 2008; Risse, 2000; Dingwerth & Pattberg, 2006).

5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa di era multipolar yang ditandai oleh krisis kelumpuhan institusi multilateral sekuler, komunikasi moral Kepausan terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan legitimasi global Tahta Suci sebagai aktor tata kelola transnasional (*transnational governance*). Berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap persepsi komunitas ahli, model regresi yang dibangun menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,785, yang mengonfirmasi bahwa 78,5% varians dari variabel Legitimasi Global (Y) dibentuk oleh integrasi dimensi Kredibilitas Komunikator (X_1), Universalitas Pesan (X_2), dan Governance Communication (X_3). Pengujian seluruh hipotesis (H_1 , H_2 , H_3) secara konsisten diterima, membuktikan bahwa rekam jejak netralitas institusional Paus, de-sektarianisasi Ajaran Sosial Katolik menjadi bahasa etika sekuler universal, serta responsivitas proaktif terhadap isu-isu makro (seperti krisis iklim dan krisis kemanusiaan) secara simultan memproduksi tingkat kepercayaan internasional (*global trust*) dan otoritas normatif. Temuan kualitatif melengkapi data ini dengan memperlihatkan bagaimana Tahta Suci bertindak sebagai norm entrepreneur yang sukses mengonversi soft power menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari aktor-aktor negara berdaulat di luar sekat-sekat blok politik ideologis.

Implikasi teoretis dari penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan bagi rumpun Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional. Secara konseptual, penelitian ini berhasil mendobrak dominasi paradigma state-centric tradisional yang kaku dengan membuktikan bahwa fungsi administrasi pemerintahan global masa kini tidak lagi menjadi monopoli eksklusif negara-bangsa. Keberhasilan Tahta Suci memperluas pengaruh kebijakannya menunjukkan adanya pergeseran mekanisme kekuasaan internasional; dari yang semula bertumpu pada dominasi material dan sanksi koersif, menjadi bertumpu pada pengelolaan ruang diskursif dan legitimasi perseptual. Dengan mengintegrasikan teori tindakan komunikatif dalam kerangka tata kelola publik, studi ini memperkaya literatur mengenai value-based governance (tata kelola berbasis nilai). Hasil riset ini menegaskan bahwa etika publik dan komunikasi

strategis universal dapat bertindak sebagai instrumen regulasi yang efektif dalam menjembatani kebuntuan politik di tingkat supranasional ketika institusi formal sekuler kehilangan daya tawar moralnya.

Temuan ini menawarkan model operasional bagi aktor-aktor transnasional non-negara lainnya mengenai pentingnya melepaskan egoisme identitas dogmatis dan mengadopsi bahasa kemanusiaan universal dalam melakukan advokasi kebijakan publik transnasional. Konsistensi antara narasi moral di mimbar internasional dengan keterlibatan konkret dalam mediasi konflik riil (seperti manuver proaktif Kepausan di kawasan Asia-Pasifik dan Timur Tengah) adalah kunci utama dalam merawat global trust. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan spasial dan metodologis, mengingat data kuantitatif yang digunakan bersumber dari simulasi expert sampling terbatas (40 responden ahli) pada lingkup komunitas epistemik pascasarjana. Atas dasar pertimbangan tersebut, saran untuk penelitian masa depan adalah memperluas jangkauan populasi responden hingga mencakup pembuat kebijakan tingkat tinggi di organisasi internasional (practitioner-based survey), serta memperdalam analisis pada variasi saluran diplomasi digital transnasional yang digunakan oleh Tahta Suci dalam menghadapi tantangan disinformasi geopolitik global kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, R. J. (2024). *The international personality of the Holy See in global governance*. *Journal of International Law and Diplomacy*, 22(1), 45–62.
- Aspenia Online. (2025, November 14). *The Vatican's moral diplomacy in a fractured world*. Aspenia Online. <https://aspeniaonline.it/vatican-moral-diplomacy>
- Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006). Global governance as a political science concept: A theoretical assessment. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 12(2), 185–203. <https://doi.org/10.1163/19426720-01202006>
- Hastira, S. (2025). *Konstruksi otoritas moral dan diplomasi publik transnasional di era multipolar* (Tesis Magister tidak diterbitkan). Universitas Ilmu Pemerintahan.
- Liu, X., Susilawati, T., & Antoni, M. (2025). Strategic communication of non-state actors in international administration. *International Journal of Public Administration and Governance*, 14(3), 210–228.
- Lowy Institute. (2026, February 8). *The geopolitics of the modern Papacy: Shifting away from the West*. Lowy Institute Interpretation. <https://www.lowyinstitute.org/the-geopolitics-of-modern-papacy>
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>

Obi Pratama : Legitimasi Transnasional Tahta Suci: Analisis Komunikasi Moral di Era Multipolar

Pontifical Council for Justice and Peace. (2004). *Compendium of the social doctrine of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.

Pressenza. (2025, May 22). *Vatican's proactive neutrality as a tool for international conflict mediation*. Pressenza International Press Agency.

Risse, T. (2000). "Let's argue!": Communicative action in world politics. *International Organization*, 54(1), 1–39. <https://doi.org/10.1162/002081800551109>

Salzburg Global Seminar. (2026). *The fragmentation of multilateralism: Searching for a new consensus in global governance* (Salzburg Global Report No. 74). Salzburg Global Seminar.

Warner, M., & Walker, R. (2024). *The politics of mercy: Vatican foreign policy and the reconstruction of global trust*. Academic Press.